

## The Problem of Commercialization in Islamic Education

### Problem Komersialisasi dalam Pendidikan Islam

Mahfida Ustdzatul Ummah<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

#### Citation (CMS-fullnote):

Mahfida Ustdzatul Ummah, "Problem Komersialisasi dalam Pendidikan Islam," *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 1 (2023): 92-112, <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.7>

Submitted: 13 May 2022

Revised: 28 May 2022

Accepted: 13 June 2023

Published: 28 June 2023

Copyright: © 2023 by Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS).

Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



**Abstract:** This article examines the problem of commercialization in Islamic education which leads to an overemphasis on financial aspects rather than the main objectives of Islamic education. This study used a critical analysis method with a literature review model based on books, scientific journals, and other documents related to the topic. The study found that the commercialization of Islamic education can cause several problems, including a decrease in religious values and principles, a decrease in the quality of education, and an increase in social inequality. Therefore, it is necessary to reorient Islamic education to overcome this problem and build the financial independence of Islamic educational institutions. Thus, Islamic education can again play an important role in forming a generation that has morals, knowledge, and a positive contribution to society and Muslims as a whole.

**Keywords:** *Commercialization, Islamic Education, Reorientation, Education Quality.*

**Abstrak:** Artikel ini mengupas problem komersialisasi dalam pendidikan Islam yang mengarah pada penekanan yang berlebihan pada aspek finansial daripada tujuan inti pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis kritis dengan model kajian literatur berdasarkan buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, maupun website. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komersialisasi dalam pendidikan Islam dapat

---

\* **Corresponding Author:** Mahfida Ustdzatul Ummah, (mahfida.ustadzatul@gmail.com), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

menimbulkan beberapa masalah, termasuk penurunan nilai dan prinsip agama, penurunan kualitas pendidikan, serta meningkatnya kesenjangan sosial. Artikel ini menemukan bahwa untuk mengatasi masalah komersialisasi dalam pendidikan Islam dapat melalui reorientasi pendidikan Islam dan membangun kemandirian finansial lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat kembali berperan penting dalam membentuk generasi yang memiliki akhlak, pengetahuan, dan kontribusi positif bagi masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** *Komersialisasi, Pendidikan Islam, Reorientasi, Kualitas Pendidikan.*

## **Pendahuluan**

Era globalisasi yang terjadi saat ini, menimbulkan perubahan penting dan drastis dalam setiap sendi kehidupan, tidak terkecuali pada ranah pendidikan.<sup>1</sup> Era globalisasi ditandai dengan ruang lingkup dunia yang tidak lagi dibatasi oleh negara atau budaya, tetapi meluas meliputi seluruh dunia (*global village*),<sup>2</sup> sehingga seolah dunia menjadi satu kesatuan. Dalam konteks pendidikan, telah terjadi perubahan signifikan pada status dan fungsinya. Pendidikan yang awalnya mengedepankan idealisme dalam upaya pengembangan manusia, kini seolah-olah dipaksa untuk bertransformasi menjadi komoditas yang tunduk pada logika pasar.<sup>3</sup> Dalam artian bahwa, sistem pendidikan dituntut untuk mampu menghasilkan tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan industri dan pasar semata.

Pendidikan, sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial, seharusnya mampu membawa bangsa Indonesia meraih keunggulan dalam persaingan global.<sup>4</sup> Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga pendidikan dituntut untuk bersaing dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas. Salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar adalah pembiayaan pendidikan. Konsep pembiayaan ini tidak terlepas dari ideologi yang berkembang di tengah masyarakat. Sejak Reformasi 1998, arah kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung mengadopsi corak liberal-kapitalistik. Hal ini tercermin dari upaya pemerintah untuk

---

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 51.

<sup>2</sup> Paul & Grahame Thompson Hirs, *Globalization in Question*, ed. P. Soemitro (United Kingdom: Blackwell Publishers Ltd, 1996), 1.

<sup>3</sup> Zubaedi, *Isu-Isu Baru Dalam Diskursus Filsafat Pendidikan Islam Dan Kapita Selektia Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 53.

<sup>4</sup> Zubaedi, 98.

menyediakan akses pendidikan secara merata bagi seluruh masyarakat melalui program-program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beasiswa Bidik Misi. Menurut Darmaningtyas, kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan akses pendidikan kepada masyarakat. Namun, ia juga menilai bahwa kebijakan tersebut lebih merupakan alat untuk meredam protes sebagian masyarakat yang menolak liberalisasi dan privatisasi dalam sektor pendidikan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, dampak jangka panjang dari kebijakan ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait sejauh mana pendidikan dapat tetap menjadi alat pembangunan sosial tanpa sepenuhnya tunduk pada logika pasar.

Secara historis, reorientasi pendidikan sebagai komoditas mendapatkan momentumnya dengan ditandatanganinya kesepakatan *General Agreement on Tariffs Trade* (GATT).<sup>6</sup> Kesepakatan tersebut mengarahkan dunia pendidikan secara global untuk lebih berpihak kepada kepentingan pasar. Akibatnya, orientasi pendidikan mengalami perubahan signifikan dengan munculnya tren baru, yaitu pendidikan yang lebih berfokus pada profit daripada kualitas. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada lembaga pendidikan umum, tetapi juga telah merambah lembaga pendidikan berbasis Islam di Indonesia. Konsekuensi dari berkembangnya tren tersebut adalah meningkatnya biaya pendidikan yang tinggi, yang pada akhirnya memperkuat praktik komersialisasi dalam sektor pendidikan.

Tren pendidikan tersebut jelas bertolak belakang dengan esensi dan maruah pendidikan yang seharusnya bersifat inklusif, membuka akses seluas-luasnya bagi setiap warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang peserta didik (*regardless of the student's background*). Konsep keterjangkauan dan aksesibilitas pendidikan sejalan dengan konsep *Education for All* (EfA) dan konsep wajib belajar yang dicanangkan pemerintahan. Oleh karena itulah, artikel ini berupaya memberikan spektrum alternatif dalam mengamati gejala-gejala komersialisasi dalam pendidikan Islam dengan tawaran perspektif yang multidisipliner. Artikel ini tidak memberikan penilaian (*judgement*) mengenai baik ataupun buruknya geliat komersialisasi dalam pendidikan Islam, karena peneliti berupaya untuk menjelaskannya seobjektif mungkin dengan

---

<sup>5</sup> Ratih Keswara, "Kebijakan Pendidikan Hanya Pura-Pura Populis," *Sindo*, 2019, <https://daerah.sindonews.com/read/765261/22/kebijakan-pendidikan-hanya-pura-pura-populis-1374742611>.

<sup>6</sup> Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan, persetujuan ini dibuat setelah berakhirnya Perang Dunia II.

menggunakan kacamata akademik, sehingga dapat menghindari munculnya kerancuan (*biased*) dan subjektivitas peneliti.

## **Pembahasan**

### **Pembiayaan dalam Pendidikan Islam di Indonesia: Kajian Sejarah**

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia melekat dengan sejarah perkembangan Islam itu sendiri. Dalam perjalanannya terdapat tujuh fase kajian pendidikan Islam di Indonesia: 1) fase kedatangan Islam ke Indonesia, 2) fase pengembangan melalui proses adaptasi, 3) fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, 4) fase kedatangan orang Barat (zaman penjajahan), 5) fase penjajahan Jepang, 6) fase merdeka, dan 7) fase pembangunan.<sup>7</sup> Dengan demikian, Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia ini menunjukkan betapa dinamisnya interaksi antara agama, budaya, dan pemerintahan dalam membentuk sistem pendidikan yang ada hingga saat ini.

Namun, jika ditinjau dari aspek pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia, fase perkembangannya dapat dibagi menjadi tiga periode utama: 1) fase prakemerdekaan, 2) fase pascakemerdekaan yang mencakup orde lama dan orde baru, serta 3) fase pascareformasi. Pada fase prakemerdekaan, yakni masa penjajahan Belanda, di mana perkembangan pendidikan Islam mulai masif. Akibatnya, pemerintah Belanda menerapkan aturan yang sangat ketat dan keras guna membatasi dan menekan perkembangan madrasah dan pondok pesantren di Indonesia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada saat itu kian masif dan sulit dibendung.<sup>8</sup> Pada tahun 1900-an, lembaga pendidikan swasta (partikelir) mulai berkembang pesat, baik berhaluan politik maupun berhaluan Islam. Berkembangnya lembaga pendidikan ini dilakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap nasionalisme rakyat untuk melawan penjajah. Adapun lembaga-lembaga tersebut di antaranya Sekolah Serikat Islam, Madrasah Islamiyah Muhammadiyah, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Persatuan Umat Islam, Al Irsyad, Madrasah Sumatra Tawalib, Pondok Pesantren Krapyak, Pondok Modern Darussalam Gontor, dan masih banyak lagi.<sup>9</sup> Jadi, pada masa ini, penjajah Belanda diskriminatif terhadap pendidikan Islam, sehingga semua

---

<sup>7</sup> Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 8.

<sup>8</sup> Zuhairini, 150.

<sup>9</sup> Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, 193–95.

lembaga pendidikan Islam secara pembiayaan mandiri dari campur tangan penguasa.

Pada fase pascakemerdekaan Indonesia, lembaga pendidikan Islam berupa madrasah dan pesantren-pesantren mulai banyak yang berupaya beradaptasi dengan sistem pendidikan konvensional. Sehingga, menurut Ridlwan Nasir, pada masa ini pondok pesantren dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu ponpes salaf atau klasik, ponpes semi berkembang, ponpes berkembang, ponpes khalaf atau modern, dan ponpes ideal.<sup>10</sup> Dari berbagai jenis pesantren tersebut, pada umumnya pembiayaan operasional pesantren masih bergantung pada usaha yang dijalankan oleh kiai ataupun melalui donasi dari masyarakat. Mayoritas pesantren belum mempunyai usaha mandiri yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan kelangsungan pesantren.<sup>11</sup> Kondisi ini jelas bukan sesuatu yang menggembirakan, mengingat usaha milik individu dari para kiai tidak mungkin berlangsung selamanya. Selain itu, pada dasarnya, setiap lembaga pendidikan memerlukan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pesantren di masa depan.

Pascareformasi, layanan pendidikan Islam tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur sistem dan regulasi tersebut adalah Dirjen Pendidikan Islam di Kementerian Agama. Dalam pendidikan Islam tertuang dalam PP nomor 55 tahun 2007 pasal 12 ayat 1 yang berbunyi "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan."<sup>12</sup> Sumber daya tersebut yang dimaksud adalah pembiayaan pendidikan Islam merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah.

---

<sup>10</sup> Lihat H.A. Rodli Makmun, "Pembentukan Karakter Berbasis Pendidikan Pesantren: Studi Di Pondok Pesantren Tradisional Dan Modern Di Kabupaten Ponorogo," *Cendekia* 12, no. 2 (2014): 222.

<sup>11</sup> Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren Di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 86–87.

<sup>12</sup> "Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007," Peraturan Pedia.id, 2007, <https://peraturanpedia.id/peraturan-pemerintah-nomor-55-tahun-2007/>.

Tabel berikut ini perbandingan dana yang diberikan pemerintah kepada pesantren atau madrasah dengan sekolah negeri.<sup>13</sup>

No	Mata Anggaran	Sumber Utama	
		Pesantren/Madrasah	Sekolah Negeri
1.	Bantuan siswa miskin	BOS + Sumber sekolah	DBH
2.	Pribadi (asrama)	Sumber sekolah	-
3.	Pemeliharaan sekolah	BOS + Sumber sekolah	BOS + Dekon + TP
4.	Persediaan komputer	BOS	BOS + DBH
5.	Layanan daya dan langganan (tetap)	Sumber sekolah	BOS
6.	Manajemen dana hibah sekolah	BOS	BOS
7.	Aktivitas penerimaan siswa baru	Sumber sekolah	BOS
8.	Pengembangan perpustakaan	BOS + Sumber sekolah	BOS
9.	Pengembangan profesi guru	BOS + Sumber sekolah	BOS
10.	Pembelian barang habis pakai	Sumber sekolah	BOS
11.	Kegiatan tes dan ujian	Sumber sekolah	BOS
12.	Kegiatan siswa	Sumber sekolah	BOS + DBH
13.	Furnitur	Sumber sekolah	BOS
14.	Gaji dan honor guru	Sumber sekolah	Pemerintah langsung

<sup>13</sup> Johan Joshi, *Makalah Pendanaan Publik Untuk Sekolah Swasta Berbiaya Rendah* (Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies, 2018), 7.

**Tabel 1:** Perbandingan dana pemerintah kepada pesantren atau madrasah dan sekolah negeri

Berikut singkatan dan penjelasannya:

1. Sumber sekolah mencakup iuran sekolah, donasi, dan pemasukan yang diperoleh dari kegiatan pesantren.
2. DBH: Dana Bagi Hasil (Pendapatan yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kota madya, atau kabupaten sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi keuangan).
3. Dekon: Dana De-Konsentrasi.
4. DAK: Dana Alokasi Khusus (Pendapatan yang diberikan oleh negara kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi, kota madya, atau kabupaten dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan program khusus daerah sesuai dengan prioritas nasional).
5. TP: Tugas Pembantuan (Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kota madya/kabupaten, sebagai bagian dari transfer tanggung jawab mereka).

Data dalam tabel di atas berasal dari sumber anggaran yang disetujui dalam Panduan BOS yang diterbitkan secara berkala oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Selain itu, laporan penggunaan dana hibah yang diajukan oleh madrasah dan sekolah swasta telah diperiksa dari bulan Februari 2018 hingga Mei 2018 untuk memverifikasi keakuratan anggaran yang digunakan. Proses verifikasi ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Jika melihat data di atas, terdapat perbedaan yang mencolok antara alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan negeri dan swasta. Dana pembiayaan pendidikan di lembaga swasta sedikit jika dibandingkan dengan lembaga negeri. Untuk itu, lembaga swasta, madrasah, dan pesantren harus memenuhi kebutuhan pendanaan mereka sendiri, yang sering kali berasal dari iuran wali murid. Kekurangan dalam pendanaan ini menyebabkan lembaga-lembaga tersebut mencari berbagai cara untuk mencapainya, termasuk dengan mengomersialkan kegiatan pendidikan di masing-masing lembaga.

## Komersialisasi Pendidikan Islam: Dampak dan Pengaruhnya

Pada era reformasi, kebijakan ekonomi pemerintah cenderung ditekan oleh kekuatan global. Mengutip gagasan Albrow bahwa, “*Globalization refers to all those processes by which the peoples of the world are incorporated into a single world society, global society.*”<sup>14</sup> (Globalisasi merujuk pada semua proses di mana semua orang di dunia menjadi masyarakat tunggal, masyarakat global). Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, globalisasi memiliki sisi positif dan negatif. Dampak positif globalisasi memiliki potensi untuk “membebaskan” lembaga pendidikan dari berbagai macam keterikatan, seperti *sentralisme, uniformisme, monolitisme, desentralisasi, peningkatan demokratisasi dan equality* dalam pendidikan, akselerasi ilmu pengetahuan, dan penyederhanaan kurikulum, di mana hanya subjek-subjek yang urgen dan instrumental bagi peserta didik dalam realitas global saja yang digunakan.<sup>15</sup> Asumsinya, jika diserahkan kepada swasta akan terjadi kompetisi yang sehat, efisien, dan terjadi perbaikan kualitas layanan.<sup>16</sup> Dengan demikian, globalisasi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, asalkan dikelola dengan bijak dan memperhatikan nilai-nilai lokal yang relevan.

Dampak buruk dari fenomena globalisasi adalah orientasi kapitalistik dalam pendidikan, yang mengakibatkan privatisasi atau pengelolaan swasta, sehingga lembaga pendidikan yang dibangun dengan menggunakan dana publik hanya dapat diakses oleh segelintir kelompok masyarakat yang mampu. Sementara masyarakat kurang mampu hanya dapat mengakses pendidikan di sekolah murah dengan standar yang rendah. Akibatnya, terjadi gap antara orang kaya dan miskin. Orang kaya memiliki kemampuan untuk bersekolah di tempat yang berkualitas, unggulan, dan terbaik, sementara orang miskin sering kali tidak memiliki akses yang sama. Hal ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) mencapai 25,95 juta orang atau sekitar 9,82% dari total penduduk.

---

<sup>14</sup> Martin Albrow, *Globalization, Knowledge and Society* (London: SAGE Publications, Inc., 1990), 45.

<sup>15</sup> Emawati, “Dampak Kapitalisme Global Terhadap Pendidikan Islam,” *Jurnal Penelitian Keislaman* 14, no. 02 (2018): 145–46.

<sup>16</sup> Agus Suwignyo, *Negara Minus Nurani: Esai-Esai Kritis Kebijakan Publik* (Jakarta: Kompas, 2009), 59.

Pada kondisi ini, terjadi minimalisasi peran negara dan maksimalisasi peran swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dinamakan kebijakan neo-liberalisme. Sektor pendidikan termasuk bagian yang terdampak kebijakan ini. Liberalisasi di bidang pendidikan ditandai dengan diberikannya hak kepada institusi-institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat (siswa dan mahasiswa). Akibatnya, biaya pendidikan menjadi menggelembung dan ada kecenderungan terjadi komersialisasi<sup>17</sup> pendidikan di berbagai tingkatan, sehingga banyak warga masyarakat tidak mampu membayar.<sup>18</sup> Hal ini menimbulkan ketimpangan akses pendidikan, yang pada akhirnya menghambat tercapainya pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Terdapat dua konsep dalam komersialisasi pendidikan. Pertama, komersialisasi pendidikan yang menekankan pada program dan peralatan pendidikan yang mahal. Kedua, komersialisasi pendidikan yang hanya memprioritaskan biaya pendaftaran dan biaya gedung, tanpa memerhatikan tanggung jawab pendidikan yang seharusnya dilakukan.<sup>19</sup> Pemahaman pertama akan mengakibatkan diskriminasi dalam pendidikan, sedangkan pengertian yang kedua, lembaga pendidikan menjanjikan pelayanan di bawah standar keuangan yang dibayarkan dengan pengambilan laba. Namun dalam hal ini, pengertian komersialisasi yang pertama yang digunakan. Dengan demikian, komersialisasi pendidikan yang menekankan pada biaya tinggi untuk program dan peralatan pendidikan dapat memperburuk ketimpangan akses pendidikan, sehingga menghambat kesempatan yang setara bagi semua kalangan masyarakat.

Adapun indikator dari komersialisasi pendidikan, yaitu (1) penyelenggaraan pendidikan dijadikan komoditas yang diperdagangkan, (2) penyelenggaraan pendidikan memerlukan biaya yang mahal, (3) penyelenggaraan pendidikan tidak memberikan kesempatan pada peserta didik

---

<sup>17</sup> Istilah komersialisasi berasal dari kata komersil yang bermakna: 1) berhubungan dengan niaga atau perdagangan, 2) dimaksud untuk diperdagangkan atau sesuatu yang diperjual-belikan atau sesuatu yang bernilai tinggi yang mengorbankan nilai-nilai lain (nilai sosial, budaya, dan sebagainya). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 515.

<sup>18</sup> Kebudayaan, 60.

<sup>19</sup> Muchtari Buchtari, *Komersialisasi Idealisme Bukan Tabu* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 201.

dari kalangan masyarakat kurang mampu, (4) penyelenggaraan pendidikan tidak memberikan subsidi silang atau dispensasi uang sekolah bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi, dan (5) penyelenggaraan pendidikan lebih berorientasi mencari keuntungan. Indikator-indikator tersebut memunculkan pemikiran bahwa pendidikan memang menjadi tempat yang rentan bagi terjadinya praktik-praktik komersial.<sup>20</sup> Dengan demikian, komersialisasi pendidikan dapat merugikan peserta didik kurang mampu dan mengabaikan tujuan pemerataan akses pendidikan.

Komersialisasi sendiri merujuk pada ideologi kapitalisme,<sup>21</sup> yang berkeyakinan bahwa pemilik modal memiliki kebebasan untuk mengembangkan usaha mereka dengan tujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Kapitalisme menyatakan bahwa tidak ada pembatasan dari pemerintah terhadap kepemilikan harta atau aset pribadi, yang memungkinkan terjadinya akumulasi modal oleh individu atau perusahaan. Mekanisme ini dapat meningkatkan kesejahteraan individu tersebut.<sup>22</sup> Max Weber (1867–1920), seorang tokoh dalam perkembangan sosiologi modern, mendefinisikan kapitalisme sebagai kehadiran industri yang memenuhi kebutuhan kelompok manusia dengan menggunakan metode perusahaan yang dikelola secara rasional, termasuk penggunaan neraca modal. Weber menggunakan semangat kapitalisme untuk menggambarkan sikap mental yang selalu berusaha mencari keuntungan secara rasional dan sistematis.<sup>23</sup> Dengan demikian, kapitalisme mendorong pencapaian keuntungan rasional, tetapi dapat menimbulkan ketimpangan sosial tanpa regulasi yang adil dalam pembagian kekayaan.

Sistem kapitalisme sebagai cara hidup memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) pengakuan terhadap hak milik pribadi tanpa batasan tertentu, (2) pengakuan hak individu untuk melakukan kegiatan ekonomi guna

---

<sup>20</sup> Herlina Asri, "Dampak Komersialisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia," *Jurnal Kajian*, 16, no. 3 (2011): 607–8.

<sup>21</sup> Kapitalisme secara etimologi berasal dari kata "*capital*" (bahasa Latin). *Capital* sebenarnya diambil dari kata "*caput*" yang berarti kepala. Arti ini menjadi jelas jika digunakan dalam istilah "pendapatan perkapita" yang berarti "pendapatan perkepala." Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2005), 52.

<sup>22</sup> Winardi, *Kapitalisme versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoretis* (Bandung: CV. Remadja Karya, 1996), 33.

<sup>23</sup> Max Weber, *Etika Protestan Dan Spirit Kapitalisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 29.

meningkatkan status sosial-ekonomi mereka, (3) pengakuan adanya motivasi ekonomi yang mendorong upaya mencapai keuntungan sebanyak mungkin, (4) kebebasan untuk berkompetisi, dan (5) pengakuan terhadap hukum pasar atau mekanisme pasar.<sup>24</sup> Dari karakteristik-karakteristik ini, dapat disimpulkan bahwa kapitalisme memiliki sifat individualistik, liberal, berorientasi pada keuntungan, kompetitif, dan berbasis pasar.<sup>25</sup>

Dalam perspektif kapitalisme, pendidikan dianggap sebagai bagian dari industri karena sekolah berperan sebagai penyedia tenaga kerja atau buruh bagi industri. Terdapat tiga dampak kapitalisme terhadap pendidikan, yaitu: (1) adanya hubungan antara kapitalisme dan pendidikan menyebabkan praktik-praktik sekolah cenderung dikendalikan oleh kaum elit ekonomi, (2) hubungan antara kapitalisme dan ilmu pengetahuan membuat tujuan ilmu pengetahuan terbatas pada pencarian keuntungan semata, dan (3) perpaduan antara kapitalisme dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan menciptakan dasar bagi ilmu pendidikan yang menekankan nilai-nilai materialisme sambil mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan martabat manusia. Akibatnya, peserta didik dalam konteks pendidikan kehilangan kepekaan terhadap hal-hal kemanusiaan dan digantikan oleh orientasi materialistik dalam kehidupan.<sup>26</sup>

Seiring dengan berkembangnya ideologi tersebut, ada standarisasi dalam mutu pendidikan yang berskala internasional, yaitu pemberlakuan ISO (*International Standardization Organization*). Prinsipnya, sistem manajemen mutu ISO dapat diterapkan oleh siapa pun, termasuk dalam konteks lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Sistem ini merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada kepuasan pelanggan, yang meliputi pelanggan internal, eksternal, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait.<sup>27</sup> Dalam konteks pendidikan, penggunaan ISO sebagai pengakuan terhadap jaminan kualitas menjadi kebutuhan bagi lembaga-lembaga tersebut, terutama yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat umum. Proses penerapan ISO ini secara bertahap akan diterapkan

---

<sup>24</sup> Mohtar Mas' oed, *Negara, Kapital, Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 50–52.

<sup>25</sup> Samrin, "Kapitalisme Dan Pendidikan Liberal-Kapitalistik," *Jurnal Shautut Tarbiyah* 33, no. 2 (2015): 134.

<sup>26</sup> Samrin, 138.

<sup>27</sup> Mulyono, "Penerapan Prinsip ISO 9001:2000 Di Lembaga Pendidikan," *El-Harokah* 63, no. 3 (2006): 389.

melalui proses sertifikasi sebagai jaminan terhadap kualitas. Dalam pendidikan kejuruan, ISO diterapkan sebagai upaya untuk menyediakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang keahlian masing-masing.<sup>28</sup>

Dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu ISO 9001-2000 untuk memenuhi kepuasan pelanggan, terdapat delapan prinsip dasar yang dikenal, yaitu fokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang-orang, pendekatan proses, pendekatan sistem dalam manajemen, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berdasarkan fakta, dan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Prinsip-prinsip dasar tersebut merupakan landasan bagi penerapan sistem manajemen mutu dalam standar ISO. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah membantu organisasi meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan atau produk yang diberikan oleh organisasi tersebut. Hal ini disebabkan karena pelanggan menginginkan produk yang sesuai dengan karakteristik yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Kebutuhan dan harapan tersebut dinyatakan dalam spesifikasi produk yang secara keseluruhan disebut sebagai persyaratan pelanggan.<sup>29</sup>

Namun, penerapan ISO ini dirasa kurang sesuai jika diterapkan di dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam, mengingat karena standar ini digunakan untuk perusahaan. Berdasarkan kaca mata ISO, proses pendidikan layaknya jasa dan peserta didik sebagai pelanggan.<sup>30</sup> Sementara prinsip dalam manajemen mutu, salah satunya adalah fokus pada pelanggan.<sup>31</sup> Apabila peserta didik sebagai pelanggan, maka mereka dapat protes atas buruknya pelayanan. Namun, dalam Islam, ada adab-adab atau etika peserta didik atau murid yang harus takzim terhadap pendidik atau guru. Tugas seorang guru bukan hanya melayani peserta didik, tetapi, menurut Imam al-Ghazali, tugas seorang guru adalah menerima segala masalah yang dihadapi oleh anak didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tegar, bersikap sopan dan penuh kasih, serta menjaga

---

<sup>28</sup> Nyoman Sudi Mahayasa, "Efektifitas Implementasi SMM ISO 9001:2008 Pada SMK Negeri Di Kota Singaraja," *Jurnal Bakti Saraswati* 5, no. 1 (2016): 20.

<sup>29</sup> Hawingyo and Agung Budi Santoso, "Menerapkan Prinsip ISO," in *Buku Pintar Asistensi SMK Berstandar Nasional / Internasional* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2004), 23.

<sup>30</sup> Cognoscenti Consulting Group, "Standart Internasional ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu," 2020, 3.

<sup>31</sup> Group, 5.

kehormatan dan kewibawaan dalam tindakan mereka.<sup>32</sup> Artinya, mendidik itu bukan faktor untung dan rugi, tetapi faktor keikhlasan dan faktor kasih sayang. Ada keterlibatan akhlak yang baik ketika guru mendidik siswanya.

## Solusi dari Komersialisasi Pendidikan Islam

Sejatinya, Islam tidak mengenal konsep komersialisasi dalam pendidikan, karena orientasi pendidikan dalam Islam, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah, adalah untuk ibadah. Namun, pendidikan Islam juga tidak dapat terlepas dari masalah pembiayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif atau solusi bagi lembaga pendidikan Islam untuk mendapatkan sumber pembiayaan tanpa bergantung pada iuran dari peserta didik.

### 1. Reorientasi Pendidikan Islam

Tradisi keilmuan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peradaban manusia. Tradisi keilmuan merupakan fondasi dari pembentukan ilmu di dalam suatu peradaban (masyarakat),<sup>33</sup> karena inti dari peradaban Islam adalah bahwa ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang dihidupkan oleh tradisi intelektual.<sup>34</sup> Dalam pembentukan peradaban ini, pendidikan disampaikan untuk semua orang (*education for all*) tanpa diskriminasi.<sup>35</sup> Sebab, tujuan pendidikan Islam adalah "*to produce a good man*", yakni menghasilkan manusia yang baik dengan pengajaran adab.<sup>36</sup> Dalam tradisi keilmuan Islam, tujuan akhir dari pendidikan harus membentuk manusia yang memiliki adab, sehingga Islam menjadi sebuah peradaban.

Dalam konsep pendidikan Islam dikenal beberapa istilah, di antaranya *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Istilah *tarbiyah* memiliki makna sebagai proses mendidik, memelihara, menjaga, dan membina semua makhluk,

---

<sup>32</sup> Abd Aziz, *Orientasi Sistem Pendidikan Agama Di Sekolah* (Yogyakarta: Teras, 2010), 20.

<sup>33</sup> Alparslan Açıkgenç, *Lahirnya Tradisi Keilmuan Dalam Islam* (Jakarta: INSISTS, 2019), 3.

<sup>34</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, "Bayt-UI-Hikmah Akademi Pertama Dalam Islam", *Jurnal Islamia* (Jakarta: Khairul Bayat Press, 2009), 90.

<sup>35</sup> Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenata Media Grup, 2010), 105.

<sup>36</sup> Syed Muhammad Al-Naqib Al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), 150–51.

termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.<sup>37</sup> Istilah ini bersifat umum karena digunakan untuk semua entitas yang mengalami pertumbuhan dan pembelajaran, seperti proses *tarbiyah* pada hewan. Namun, menurut al-Attas, istilah *tarbiyah* tidak sepenuhnya tepat jika digunakan untuk merujuk pada pendidikan dalam konteks Islam.<sup>38</sup> Sedangkan konsep *ta'lim*,<sup>39</sup> biasanya merujuk pada pembelajaran yang bermakna transfer ilmu pengetahuan<sup>40</sup> dan teknologi yang dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiah. Proses pembelajaran ini dilaksanakan lebih mengedepankan aspek wacana keilmuan melalui pengembangan intelektualitas kepada peserata didik secara berkelanjutan.<sup>41</sup>

Adapun *ta'dib*, berasal dari kata "*addaba*"<sup>42</sup> dan derivasinya. Ia mengandung arti bahwa pendidikan dalam Islam mencakup ilmu dan amal.<sup>43</sup> Pendidikan Islam merupakan hasil dari konsepsi beberapa unsur, konsep agama (*dīn*), konsep manusia (*insān*), konsep ilmu (*ilm* dan *ma'rifah*), konsep kebijakan (*hikmah*), konsep keadilan (*adl*), konsep amal (amal sebagai adab), dan konsep universitas (*kuliyah-jāmi'ah*).<sup>44</sup> Oleh karenanya, istilah *ta'dib* lebih integratif dan komprehensif karena sudah mencakup pengetahuan (*ilm*), pengajaran (*ta'lim*), dan pengasuhan yang baik (*tarbiyah*).<sup>45</sup> Pendidikan dengan *ta'dib* itu mengarahkan manusia untuk mengenal Tuhannya, menjadikan Nabi Muhammad saw. sebagai tauladan, dan mengikuti jalan para ulama. Dari sini, manusia beradab memahami serta mampu mengembangkan potensi dirinya, sebab potensi tersebut adalah

<sup>37</sup> Jalaluddin, *Teologi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 115.

<sup>38</sup> Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, ed. Haidar Baghir (Jakarta: Mizan, 1992), 35.

<sup>39</sup> Istilah *ta'lim* dalam Al-Qur'an menggunakan bentuk *fi'il* (kata kerja) dan *isim* (kata benda) dengan penyebutan 41 kali pada 23 surah. Salah satunya terdapat dalam QS. al-Rahman (55) ayat 1-4 yang mengandung arti memberi tahu, menjelaskan, dan memberi pemahaman. Ahmad Takdir Ilahi, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), 161.

<sup>40</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islami* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 145.

<sup>41</sup> Ilahi, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*, 162-63.

<sup>42</sup> Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, ed. Haidar Baghir (Jakarta: Mizan, 1992), 53. Lihat juga Wan Mohn Nor Wan Daud, *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquin al-Attas* (Jakarta: Mizan, 2003), 175.

<sup>43</sup> Daud, 77.

<sup>44</sup> Syed Muhammad Al-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, 8.

<sup>45</sup> Daud, 75.

amanah dari Allah.<sup>46</sup> Pendidikan dengan *ta'dib* itu juga bertujuan menghasilkan individu Muslim yang terdidik dengan baik, memiliki sifat yang benar, jujur, moderat, berani, dan adil dalam menjalankan kewajibannya dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan prioritas yang dipahaminya.<sup>47</sup> Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tauhid, di mana objek-objek pendidikan dilihat melalui pandangan hidup Islam (*Islamic worldview*).<sup>48</sup>

Dalam konteks sebagai pendidik, penting bagi seseorang untuk memegang nilai-nilai Islam. Menurut Imam al-Ghazali, seorang guru harus memiliki etika khusus dan tugas-tugas tertentu. Pertama, guru harus menunjukkan kasih sayang kepada murid dan memperlakukannya dengan penuh perhatian seolah-olah mereka adalah anak sendiri. Kedua, guru harus mencontoh perilaku Rasulullah saw. Dalam hal ini, motivasi mengajar bukanlah mencari upah, penghargaan, atau ucapan terima kasih, tetapi semata-mata untuk Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ketiga, guru tidak boleh mengabaikan sedikit pun nasihat dengan melarang murid untuk mempelajari tingkat tertentu sebelum mereka berhak melakukannya. Mereka juga harus belajar ilmu yang lebih dalam sebelum menyelesaikan ilmu yang lebih dasar. Tujuan dari menuntut ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah.<sup>49</sup> Jadi, meski pendidik diperkenankan mendapat upah, tetapi etika dalam Islam, pendidik harus meluruskan niat bahwa dia mengajar niatnya untuk beribadah kepada Allah.

## 2. Kemandirian Lembaga Pendidikan Islam

Pendanaan dalam konteks pendidikan memiliki peranan penting dalam pendidikan Islam. Meskipun pendanaan bukanlah segalanya, tetapi tanpa pendanaan, pelaksanaan pendidikan akan sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>50</sup> Terdapat beberapa prinsip yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan dana pendidikan dalam Islam, di

---

<sup>46</sup> Adian Husaini, *Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter Dan Beradab* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010), vii.

<sup>47</sup> Daud, *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquin Al Attas*, 201.

<sup>48</sup> Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam, An Exposition of The Fundamental Element of TheWorldview of Islam* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995), 2.

<sup>49</sup> Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Semarang: Toha Putra, n.d.), 55–46.

<sup>50</sup> Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, 219.

antaranya ikhlas, tanggung jawab terhadap Tuhan, sukarela, halal, kecukupan, berkelanjutan, keseimbangan, dan proporsional.<sup>51</sup> Untuk menuju kemandirian dalam pembiayaan, selain dari pemberian pemerintah dan iuran orang tua murid, lembaga pendidikan juga dapat menggali sumber dana dari pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf.<sup>52</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa dari jumlah derma yang terkumpul setiap tahun sebesar 19,3 triliun rupiah, hanya 5%–7% yang mampu diserap oleh lembaga pegumpul zakat, infak, dan sedekah yang terlembaga secara profesional, sementara sisanya diserahkan langsung oleh pemberi kepada fakir miskin atau lembaga penyalur yang berbasis masjid. Distribusi dana filantropi Islam tersebut secara umum berorientasi konsumtif, sehingga potensi penggunaannya belum berfungsi secara maksimal. Meskipun demikian, pertumbuhan lembaga profesional pengelola ZIS (zakat, infak, dan sedekah) yang disponsori oleh pemerintah (Badan Amil Zakat/BAZ), maupun yang dikelola oleh masyarakat (Lembaga Amil Zakat/LAZ dan Baitul Maal wa Tamwil/BMT) telah berusaha memadukan konsep derma dalam Islam dengan konsep manajemen pemberdayaan dan rekayasa sosial guna membangun paradigma filantropi Islam yang berorientasi produktif.<sup>53</sup>

Salah satu organisasi filantropi di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) untuk kepentingan pendidikan adalah Dompot Dhuafa. Lembaga ini menggunakan dana dari ZISWAF serta sumber dana halal lainnya untuk memberdayakan dan membantu masyarakat kurang mampu melalui pendekatan budaya, dengan melibatkan kegiatan filantropis dan wirausaha sosial profetik. Dompot Dhuafa berkomitmen untuk terus memperkuat masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menjalankan

---

<sup>51</sup> Nata, 229–30.

<sup>52</sup> Penulis merujuk istilah ini kepada Farid Wadjdy and Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 125. Lihat juga Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq Dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), vi.

<sup>53</sup> Ahmad Gaus A. F., *Filantropi Dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), viii.

sistem yang berprinsip keadilan.<sup>54</sup> Salah satu contoh penerapan dana umat dalam pemberdayaan pendidikan yang dikembangkan Dompot Dhuafa adalah sekolah SMART Ekselensia Indonesia.<sup>55</sup> Sekolah ini adalah sebuah institusi pendidikan berasrama yang menawarkan program akselerasi selama 5 tahun dari tingkat SMP hingga SMA, dan biaya sekolahnya gratis. Didirikan pada tahun 2004 di Parung, Bogor, sekolah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang memiliki potensi, tetapi menghadapi kendala ekonomi yang cukup besar.<sup>56</sup>

Salah satu contoh penggunaan wakaf produktif yang memiliki dampak signifikan dalam pengembangan pendidikan, adalah seperti yang telah dilakukan di Al-Azhar Mesir. Dalam pengelolaan dana hasil wakaf produktif di Al-Azhar, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) menggunakan dana tersebut untuk mendukung biaya operasional pendidikan di Al-Azhar, (2) memberikan keberlangsungan kesejahteraan bagi guru, dosen, dan staf pendidikan, (3) membiayai pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, (4) membangun fasilitas penunjang, seperti gedung olahraga, lapangan sepak bola, dan fasilitas lainnya, (5) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan (6) melakukan pembangunan masjid sebagai bagian dari pengembangan pendidikan di Al-Azhar.<sup>57</sup>

Di Indonesia, contoh lembaga yang berhasil melakukan pengelolaan wakaf produktif adalah Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo di Jawa Timur. Institusi pendidikan ini tidak bergantung pada pihak lain termasuk subsidi dari pemerintah, namun berusaha untuk melakukan kegiatan ekonomi mandiri dengan mengelola harta benda wakaf secara produktif dengan unit-unit usaha di atas tanah wakaf,<sup>58</sup> dengan bidang

---

<sup>54</sup> Prima Hadi Putra, "Tentang Kami," Yayasan Dompot Dhuafa Republika, accessed November 19, 2019, <https://www.dompotdhuafa.org/tentang-kami/>.

<sup>55</sup> Nurfaidah Djaelani, "Analisis Pengelolaan Dana Pendidikan Di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa (Studi Kasus: Program Pendidikan Sekolah SMART Ekselensia Indonesia)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

<sup>56</sup> Prima Hadi Putra, "Program Pendidikan," Yayasan Dompot Dhuafa Republika, accessed November 19, 2019, <https://www.dompotdhuafa.org/program/program-pendidikan/>.

<sup>57</sup> Abdurrahman Kasdi, "Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Quality* 3, no. 2 (2015): 443–45.

<sup>58</sup> Anas Budiharjo, *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo* (Yogyakarta: UIN Sunankalijaga, 2011), 65.

usaha berupa perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, pabrik, percetakan, dan penerbitan.<sup>59</sup> Unit-unit usaha yang dikelola sangat banyak berupa, apotek, toko bangunan, konveksi, SPBU, pabrik roti dan lain sebagainya. Hasil dari unit-unit usaha ini digunakan untuk kesejahteraan guru, pembantu pondok, sarana prasarana, dan pengembangan institusi pendidikan.

Biaya penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak dibebankan kepada santri (dalam hal ini sebagai peserta didik). Santri hanya dikenakan biaya-biaya yang berkenaan dengan kebutuhannya sendiri, seperti makan, minum, kertas, listrik, dan sumbangan pembangunan. Besarnya biaya yang dibayarkan santri tidak sebanding dengan besarnya anggaran belanja pondok.<sup>60</sup> Al-Azhar Mesir dan Pondok Modern Darussalam Gontor telah berhasil menjalankan sistem wakaf produktif untuk pembiayaan pendidikan secara profesional, sehingga institusi mampu mandiri dan beridikari dalam mengembangkan pendidikan.

## Penutup

Ada dua konsep yang berbeda dalam pemahaman tentang komersialisasi pendidikan. Pertama, komersialisasi pendidikan dapat diartikan sebagai penekanan pada program pendidikan dan peralatan yang mahal dalam lembaga pendidikan. Kedua, komersialisasi pendidikan dapat diartikan sebagai penekanan pada penerimaan uang pendaftaran dan biaya gedung oleh lembaga pendidikan, seraya mengabaikan tanggung jawab dalam memberikan pendidikan yang layak. Pendidikan hanya bermakna materi dan bertujuan pada fasilitas semata. Dalam Islam, pendidikan harus dikembalikan seperti tujuan dan makna awalnya, yaitu pendidikan Islam diorientasikan untuk mengenal Tuhan, mendekatkan diri kepada-Nya, dan menjadikan anak didik sebagai insan beradab (*insān adabī*). Adapun pendidik harus ikhlas dalam mengajar, meski tidak menafikan adanya upah. Sebagai solusi dari kemahalan biaya pendidikan adalah memaksimalkan filantropi Islam, yaitu dengan zakat, infak, sedekah, dan

---

<sup>59</sup> Nurul Iman, *Wakaf untuk Kemandirian Pendidikan: Best Practice Manajemen Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo* (Ponorogo: Penerbit Wade, n.d.), 215.

<sup>60</sup> Iman, *Wakaf Untuk Kemandirian Pendidikan: Best Practice Manajemen Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*, 215–16.

wakaf.[]

## Daftar Pustaka

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Konsep Pendidikan Dalam Islam*. Edited by Haidar Baghir. Jakarta: Mizan, 1992.
- . *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.
- . *Prolegomena to the Metaphysics of Islam, An Exposition of The Fundamental Element of TheWorldview of Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1995.
- Albrow, Martin. *Globalization, Knowledge and Society*. London: SAGE Publications, Inc., 1990.
- Armando, Nina M. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Asri, Herlina. "Dampak Komerisalisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia." *Jurnal Kajian*, 16, no. 3 (2011).
- Aziz, Abd. *Orientasi Sistem Pendidikan Agama Di Sekolah*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Açikgenç, Alparslan. *Lahirnya Tradisi Keilmuan Dalam Islam*. Jakarta: INSISTS, 2019.
- Buchtari, Muchtari. *Komersialisasi Idealisme Bukan Tabu*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Budiharjo, Anas. *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*. Yogyakarta: UIN Sunankalijaga, 2011.
- Daud, Wan Mohn Nor Wan. *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas*. Jakarta: Mizan, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamu Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Djaelani, Nurfaidah. "Analisis Pengelolaan Dana Pendidikan Di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa (Studi Kasus: Program Pendidikan Sekolah SMART Ekselensia Indonesia)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Emawati. "Dampak Kapitalisme Global Terhadap Pendidikan Islam." *Jurnal Penelitian Keislaman* 14, no. 02 (2018).
- F., Ahmad Gaus A. *Filantropi Dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Ghazali, Al. *Ihya Ulumuddin*. Semarang: Toha Putra, n.d.

- Group, Cognoscenti Consulting. "Standart Internasional ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu," 2020.
- Hawingyo., Agung Budi Santoso. "Menerapkan Prinsip ISO." In *Buku Pintar Asistensi SMK Berstandar Nasional / Internasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2004.
- Hirs, Paul & Grahame Thompson. *Globalization in Question*. Edited by P. Soemitro. United Kingdom: Blackwell Publishers Ltd, 1996.
- Husaini, Adian. *Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter Dan Beradab*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010.
- Ilahi, Ahmad Takdir. *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012.
- Iman, Nurul. *Wakaf Untuk Kemandirian Pendidikan: Best Practice Manajemen Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*. Ponorogo: Penerbit Wade, n.d.
- Jalaluddin. *Teologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Joshi, Johan. *Makalah Pendanaan Publik Untuk Sekolah Swasta Berbiaya Rendah*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies, 2018.
- Kasdi, Abdurrahman. "Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Quality* 3, no. 2 (2015).
- Keswara, Ratih. "Kebijakan Pendidikan Hanya Pura-Pura Populis." *Sindo*, 2019. <https://daerah.sindonews.com/read/765261/22/kebijakan-pendidikan-hanya-pura-pura-populis-1374742611> .
- Mahayasa, Nyoman Sudi. "Efektifitas Implementasi SMM ISO 9001:2008 Pada SMK Negeri Di Kota Singaraja." *Jurnal Bakti Saraswati* 5, no. 1 (2016).
- Makmun, H.A. Rodli. "Pembentukan Karakter Berbasis Pendidikan Pesantren: Studi Di Pondok Pesantren Tradisional Dan Modern Di Kabupaten Ponorogo." *Cendekia* 12, no. 2 (2014).
- Mas'ood, Mohtar. *Negara, Kapital, Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Mulyono. "Penerapan Prinsip ISO 9001:2000 Di Lembaga Pendidikan." *El-Harokah* 63, no. 3 (2006).
- Nasir, Ridlwan. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren Di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenata Media Grup, 2010.
- "Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007." Peraturan Pedia.id, 2007.

- <https://peraturanpedia.id/peraturan-pemerintah-nomor-55-tahun-2007/>.
- “Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen.” Badan Pusat Statistik, 2018. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>.
- Putra, Prima Hadi. “Program Pendidikan.” Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Accessed November 19, 2019. <https://www.dompotdhuafa.org/program/program-pendidikan/>.
- . “Tentang Kami.” Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Accessed November 19, 2019. <https://www.dompotdhuafa.org/tentang-kami/>.
- Samrin. “Kapitalisme Dan Pendidikan Liberal-Kapitalistik.” *Jurnal Shautut Tarbiyah* 33, no. 2 (2015).
- Shalehuddin, Wawan Shofwan. *Risalah Zakat, Infaq Dan Sedekah*. Bandung: Tafakur, 2011.
- Suwignyo, Agus. *Negara Minus Nurani: Esai-Esai Kritis Kebijakan Publik*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Wadjdy, Farid., Mursyid. *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Weber, Max. *Etika Protestan Dan Spirit Kapitalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Winardi. *Kapitalisme versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoretis*. Bandung: CV. Remadja Karya, 1996.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islami*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. “Bayt-UI-Hikmah Akademi Pertama Dalam Islam”. *Jurnal Islamia*. Jakarta: Khairul Bayat Press, 2009.
- Zubaedi. *Isu-Isu Baru Dalam Diskursus Filsafat Pendidikan Islam Dan Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Zuhairini. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.